

PERBANDINGAN KURIKULUM 1947, 1964, 1968 DAN KURIKULUM MERDEKA DALAM KONTEKS PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Eko Pujiono^{1*}, Haidar Rohbiyatun², Afina Sulistiyahati³, Hana Tristiandari⁴, Rina Nurhayati⁵, Tri Fena Susi Agustin⁶, Listyowati⁷, Ngasbun Egar⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

Email: tsaniamaziya@gmail.com*

Article History	Received 2025-05-30	Accepted 2025-06-16	Published 2025-08-04
-----------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan bagian esensial dalam pembentukan kepribadian dan moralitas peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendidikan karakter dalam tiga kurikulum nasional Indonesia Kurikulum 1947, 1964, dan 1968 serta Kurikulum Merdeka sebagai pendekatan terbaru. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*library research*), dengan teknik analisis konten terhadap literatur historis, kebijakan pendidikan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap kurikulum mencerminkan dinamika sosial-politik zamannya dan memiliki pendekatan berbeda dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Kurikulum 1947 menekankan nasionalisme dan keterampilan praktis; Kurikulum 1964 fokus pada Pancawardhana sebagai sistem pendidikan karakter yang menyeluruh; Kurikulum 1968 menegaskan pembentukan manusia Pancasila dengan integrasi nilai moral, kewarganegaraan, dan keterampilan. Sementara itu, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan karakter sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan antar kurikulum, kesamaan tujuan utama tetap terlihat, yaitu membentuk generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan zaman. Penerapan pendidikan karakter yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

Kata Kunci: pendidikan karakter; kurikulum; perubahan

Abstract

Character education is an essential component in shaping students' personalities and moral values. This study aims to analyze the implementation of character education in three of Indonesia's national curricula—namely the 1947, 1964, and 1968 curricula—as well as the Kurikulum Merdeka (Independent Curriculum) as the most recent approach. The research employs a library research method, utilizing content analysis techniques on historical literature, educational policies, and relevant academic journals. The findings indicate that each curriculum reflects the socio-political dynamics of its era and adopts different approaches to instilling character values. The 1947 Curriculum emphasizes nationalism and practical skills; the 1964 Curriculum focuses on Pancawardhana as a comprehensive character education system; the 1968 Curriculum stresses the formation of Pancasila individuals through the integration of moral values, citizenship, and practical competencies. Meanwhile, the Kurikulum Merdeka offers greater flexibility for schools

and teachers to develop character education tailored to local contexts and students' needs. The study concludes that despite the differences in approach among the curricula, they share a common primary goal: to cultivate a generation with strong character, competitiveness, and the ability to meet contemporary challenges. Sustainable character education requires active collaboration among schools, teachers, parents, and the broader community.

Keywords: *character education; curriculum; change*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan Indonesia, karena bertujuan untuk membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Di Indonesia, kurikulum pendidikan yang diterapkan selalu berkembang mengikuti kebutuhan zaman, termasuk dalam aspek pendidikan karakter. Kurikulum 1947, 1964, 1968, serta Kurikulum Merdeka, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter bangsa melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masing-masing periode. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penekanan dan implementasi karakter dalam setiap kurikulum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Kurikulum 1947, 1964, 1968, dan Kurikulum Merdeka dalam konteks pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan kurikulum yang telah diterapkan selama beberapa dekade ini memengaruhi pembentukan karakter siswa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kuat dalam memprioritaskan pendidikan karakter, setiap kurikulum memiliki kekuatan dan tantangannya sendiri dalam menyampaikan nilai-nilai moral kepada siswa. Misalnya, Kurikulum 1947 lebih fokus pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran sosial, sementara Kurikulum 1964 memperkenalkan integrasi nilai Pancasila dan sosialisme dalam konteks yang lebih politis (Kartodirdjo, 2015). Di sisi lain, Kurikulum 1968 berusaha memadukan aspek moral dengan keterampilan praktis untuk membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan pembangunan ekonomi (Husen, 1996). Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan antara analisis kurikulum sebelumnya dengan perkembangan terbaru dalam Kurikulum Merdeka, yang berfokus pada penguatan karakter dan kebebasan belajar siswa.

Kesenjangan yang ditemukan dalam literatur terkait adalah kurangnya penelitian yang membandingkan dampak spesifik kurikulum-kurikulum tersebut terhadap pengembangan karakter bangsa dalam konteks pendidikan Indonesia yang dinamis. Dalam literatur yang ada, penelitian cenderung lebih fokus pada analisis isi materi pelajaran atau metodologi pengajaran tanpa mempertimbangkan secara khusus bagaimana kurikulum tersebut membentuk karakter siswa dalam menghadapi perkembangan sosial dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menutupi kesenjangan tersebut dengan mengkaji perbandingan kurikulum tersebut dalam perspektif pendidikan karakter dan bagaimana setiap kurikulum berperan dalam menciptakan generasi yang tidak hanya terampil, tetapi juga berbudi pekerti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam merancang kurikulum yang tidak

hanya relevan dengan tuntutan akademis, tetapi juga dapat mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan membandingkan berbagai kurikulum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dalam konteks pembentukan karakter bangsa.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perbedaan penekanan dan struktur kurikulum 1947, 1964, 1968, dan Kurikulum Merdeka dalam membangun karakter bangsa, (2) menilai dampak dari masing-masing kurikulum terhadap pengembangan karakter siswa, dan (3) mengidentifikasi relevansi nilai-nilai karakter dalam setiap kurikulum terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum nasional yang dapat mendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengandalkan metode tinjauan pustaka, dimulai dari pengumpulan dokumen primer dan sekunder yang relevan dengan Kurikulum 1947, 1964, 1968, serta Kurikulum Merdeka, termasuk buku, jurnal, dan kebijakan resmi yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir dan artikel jurnal pada lima tahun terakhir. Setelah literatur terhimpun, setiap judul dan abstrak diseleksi secara sistematis untuk memastikan keterkaitan langsung dengan pendidikan karakter dan kerangka historis kurikulum, lalu dilakukan ekstraksi data untuk mencatat informasi tentang tujuan, struktur, implementasi, dan penekanan nilai karakter masing-masing kurikulum. Analisis data dilaksanakan melalui sintesis tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi karakter—seperti nasionalisme, tanggung jawab sosial, kemandirian, dan kreatifitas—kemudian membandingkan pola penekanan nilai ini antar kurikulum. Proses ini melibatkan identifikasi tema utama, penelusuran konsistensi temuan antar sumber, dan pencatatan gap atau perbedaan yang muncul dalam literatur sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kurikulum 1947 secara konsisten memprioritaskan semangat kebangsaan dan kesadaran bernegara, Kurikulum 1964 semakin mengintegrasikan nilai Pancasila dengan pendekatan sosialisme terencana, sedangkan Kurikulum 1968 menambahkan dimensi keterampilan praktis dan evaluasi berkelanjutan. Kurikulum Merdeka akhirnya tampil menekankan kemerdekaan belajar dan diversifikasi aktivitas karakter yang kontekstual, namun masih menuntut kesiapan guru dalam merancang penilaian karakter. Perbandingan ini menegaskan adanya pergeseran bertahap dari kurikulum yang sangat terpusat pada nilai-nilai kebangsaan ke arah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis tematik tinjauan pustaka, ditemukan empat dimensi utama yang menjadi fokus pendidikan karakter dalam setiap kurikulum: nasionalisme, tanggung jawab sosial, keterampilan praktis, dan kemandirian belajar. Seiring perkembangan kurikulum di Indonesia, pendekatan terhadap masing-masing dimensi ini telah mengalami perubahan

signifikan, yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di setiap periode.

Perubahan ini dapat dilihat dalam penerapan masing-masing dimensi dalam Kurikulum 1947, 1964, 1968, dan Kurikulum Merdeka, yang masing-masing memiliki pendekatan dan fokus berbeda terhadap pengembangan karakter siswa. Untuk mempermudah pemahaman, tabel berikut merangkum bagaimana dimensi karakter tersebut diterapkan dalam setiap kurikulum, serta perbedaan pendekatan yang terjadi sepanjang perjalanan kurikulum di Indonesia.

Tabel 1. memberikan gambaran komprehensif mengenai evolusi dimensi karakter yang menjadi fokus utama dalam pendidikan Indonesia, dan bagaimana setiap kurikulum menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan sosial yang berkembang. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai penerapan dimensi tersebut:

Tabel 1. Penerapan Dimensi pada kurikulum

Dimensi Karakter	Kurikulum 1947	Kurikulum 1964	Kurikulum 1968	Kurikulum Merdeka
Nasionalisme	Sangat dominan, penanaman cinta tanah air	Integrasi nilai Pancasila dalam tiap mata pelajaran	Lanjutan, disertai evaluasi moral berkelanjutan	Tetap penting, namun disesuaikan dengan konteks lokal
Tanggung jawab sosial	Kesadaran kolektif; semangat gotong royong	Ditekankan sebagai bagian sosialisme terencana	Diukur melalui aktivitas lapangan dan proyek warga	Diintegrasikan melalui proyek Pancasila dan literasi nilai
Keterampilan praktis	Terbatas pada keahlian dasar (pertanian)	Tetap ada dalam hari “Krida”, namun terpusat praktis	Meluas ke evaluasi berkelanjutan dan aplikasi lapangan	Diversifikasi, memberikan pilihan materi sesuai minat
Kemandirian belajar	Kurang ditekankan, guru sebagai pusat	Mulai diperkenalkan melalui metode “gonggoy rongyot”	Meningkat melalui evaluasi berkelanjutan	Sangat ditekankan: peserta didik merancang pembelajaran

Nasionalisme selalu menjadi tema sentral dalam pendidikan karakter Indonesia. Pada Kurikulum 1947, penanaman nilai nasionalisme dilakukan melalui pengajaran sejarah kemerdekaan dan simbol-simbol negara dalam hampir setiap mata pelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda (Kartodirdjo, 2015). Sukmadinata (2005) mengungkapkan bahwa Kurikulum 1947 bertujuan untuk menanamkan nasionalisme melalui pembelajaran sejarah, tetapi terbatas pada pengetahuan teoritis tanpa adanya tindakan nyata. Hal ini menyebabkan pengajaran nasionalisme tidak selalu sejalan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan generasi muda untuk memahami dan merasakan identitas kebangsaan secara praktis. Namun, meskipun ada fokus kuat pada nasionalisme, pendekatannya sangat terpusat pada pengajaran teoritis, yang tidak memberikan banyak ruang bagi siswa untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial. Prayitno (2003) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter dalam konteks kurikulum Indonesia sejak awal lebih banyak berfokus pada internalisasi nilai-nilai

teori kebangsaan, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk merasakan atau mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Hal ini berdampak pada kurangnya keterlibatan aktif siswa dalam membangun semangat kebangsaan

Sebagai respons terhadap kebutuhan perubahan sosial dan politik, Kurikulum 1964 mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran, mengaitkan nasionalisme dengan tanggung jawab sosial kolektif. Dalam konteks sosialisme terencana, nasionalisme bukan hanya soal simbol, melainkan suatu kewajiban moral yang harus diterjemahkan dalam praktik nyata, termasuk melalui kegiatan sosial di masyarakat (Aisy & Hudaiadah, 2021). Hal ini diperkuat dengan Kurikulum 1968, yang memperkenalkan evaluasi moral berkelanjutan melalui kegiatan proyek lapangan, menguji penerapan nilai-nilai karakter dalam konteks nyata (Respatiadi et al., 2022).

Dimensi tanggung jawab sosial mengalami perkembangan yang menarik dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 1947, tanggung jawab sosial lebih bersifat normatif, yang tercermin dalam semangat gotong royong. Kurikulum 1964 membawa dimensi ini lebih jauh dengan mengaitkan kewarganegaraan aktif sebagai bagian dari sistem sosialisme terencana, mengajak siswa untuk berpikir kolektif mengenai peran mereka dalam pembangunan negara (Dardji, 2005). Program hari "Krida" pada kurikulum ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang kemudian diperluas lagi pada Kurikulum 1968 dengan kegiatan proyek warga yang melibatkan partisipasi sosial secara lebih mendalam (Hana, Darmawan, & Nurhadi, 2020).

Pendidikan keterampilan praktis adalah dimensi yang sangat penting dalam Kurikulum 1947 karena dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat agraris (Dewi, 2004). Keterampilan ini sangat relevan dengan keadaan sosial ekonomi Indonesia pada masa itu. Namun, dengan perkembangan zaman, keterampilan yang diajarkan dalam Kurikulum 1964 dan 1968 mulai meluas tidak hanya mencakup keterampilan teknis tetapi juga keterampilan yang berhubungan dengan moral dan sosial melalui evaluasi berkelanjutan dan pengamatan lapangan (Raharjo, 2020).

Dalam Kurikulum Merdeka, dimensi keterampilan praktis semakin beragam, dengan pilihan modul yang lebih beragam sesuai dengan minat siswa, termasuk kewirausahaan dan literasi digital. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis pada minat dan kebutuhan lokal yang dapat memperkaya pengembangan karakter siswa (Tomlinson, 2017).

Kemandirian belajar adalah salah satu dimensi yang mendapatkan perhatian lebih dalam Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 1947, pendidikan lebih terpusat pada guru, dengan sedikit ruang untuk kemandirian siswa (Husen, 1996). Sedangkan Syarifuddin, M., & Rahmat, R. (2018) menuliskan bahwa Kurikulum 1947 lebih terpusat pada pengajaran yang dilakukan oleh guru, dengan sedikit ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi atau belajar secara mandiri. Namun, dalam Kurikulum 1964, ada perubahan menuju penerapan metode "gonggoy rongyot", yang sedikit membuka jalan bagi siswa untuk mengeksplorasi pembelajaran secara lebih aktif, meskipun tetap di bawah pengawasan ketat guru (Respatiadi et al., 2022).

Kurikulum 1968 memperkenalkan evaluasi berkelanjutan yang menilai kemampuan praktis dan kemampuan berpikir kritis siswa secara lebih holistik. Ini memberikan ruang

yang lebih besar bagi siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mereka, meskipun tetap dengan pengawasan ketat dari pengajar. Pada Kurikulum Merdeka, otonomi belajar menjadi lebih dominan. Siswa diberikan kebebasan lebih besar untuk memilih materi dan merancang pembelajaran mereka, sesuai dengan prinsip learner agency yang mendukung perkembangan kreativitas dan kemandirian siswa dalam proses belajar mereka (Biesta, 2019).

Perubahan dalam peran guru juga menjadi aspek kunci yang membedakan implementasi pendidikan karakter dalam masing-masing kurikulum. Pada Kurikulum 1947 hingga 1964, guru berperan sebagai pusat pengajaran yang menentukan semua aktivitas belajar, termasuk dalam penanaman nilai karakter (Kartodirdjo, 2015). Dalam Kurikulum 1968, meskipun evaluasi moral berkelanjutan diperkenalkan, guru masih berperan utama dalam merancang dan mengontrol seluruh aktivitas pembelajaran (Hana, Darmawan, & Nurhadi, 2020). Sebaliknya, pada Kurikulum Merdeka, guru bertransformasi menjadi fasilitator yang mendampingi siswa dalam merancang pembelajaran dan mengevaluasi karakter mereka secara partisipatif. Model ini sejalan dengan konsep learner agency, di mana guru lebih berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa merefleksikan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mereka melalui pengalaman nyata (Suryani & Sunardi, 2023).

Evaluasi karakter juga telah mengalami perubahan signifikan dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Kurikulum 1947 tidak memiliki sistem penilaian karakter formal, menjadikan penilaian karakter sebagai hasil akhir yang sulit diukur (Dewi, 2004). Pada Kurikulum 1964, penilaian dilakukan melalui integrasi aspek moral dan sosial dalam raport, meskipun sering kali bersifat normatif dan tidak mendalam (Dardji, 2005). Kurikulum 1968 mulai mengenalkan penilaian afektif melalui observasi lapangan dan portofolio, yang memperkaya pemahaman karakter siswa dalam konteks sosial (Raharjo, 2020). Kurikulum Merdeka, dengan pendekatan penilaian autentik, memungkinkan guru dan siswa untuk bersama-sama merancang indikator penilaian karakter, termasuk portofolio digital dan asesmen sejawat, yang meningkatkan akuntabilitas dan pemahaman siswa terhadap perkembangan karakter mereka secara lebih holistik dan kontekstual (Kemendikbudristek, 2022).

D. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa evolusi kurikulum Indonesia mulai dari Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan nasionalisme dan gotong-royong secara seragam, melalui Rentjana 1964 dan Kurikulum 1968 yang memperkenalkan kerangka evaluasi moral berkelanjutan dan penguatan keterampilan praktis, hingga Kurikulum Merdeka yang memadukan fleksibilitas lokal, diferensiasi materi, dan otonomi peserta didik telah menciptakan pergeseran paradigmatik dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Temuan menunjukkan bagaimana setiap kurikulum menambahkan lapisan baru pada empat dimensi karakter utama nasionalisme, tanggung jawab sosial, keterampilan praktis, dan kemandirian belajar dengan puncak kebaruan berupa model penilaian autentik yang kolaboratif dan kontekstual serta peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Dampaknya, praktik pendidikan karakter kini tidak hanya menjadi muatan kurikulum formal, namun juga menjadi pengalaman nyata yang memberdayakan siswa sebagai agen perubahan,

memperkaya wacana teori pembelajaran karakter dan menawarkan kerangka adaptif bagi pengembangan kurikulum di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aisy, A., & Hudaiah, S. (2021). Transformasi kurikulum Indonesia: Pendekatan sosialisme dan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 123–135.
- Biesta, G. (2019). *Good education in an age of measurement*. London: Routledge.
- Dardji, D. (2005). *Sejarah pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Dewi, L. A. (2004). *Pengembangan kurikulum dan karakter bangsa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hana, E. D., Darmawan, B., & Nurhadi, D. (2020). Implementasi Kurikulum 1968 dan pembentukan karakter. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(3), 200–214.
- Husen, T. (1996). *Kurikulum dan pembelajaran di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartodirdjo, S. (2015). *Pendidikan dan sejarah kurikulum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Prayitno, S. (2003). *Pendidikan karakter dan nilai kebangsaan di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, T. (2020). Evaluasi berkelanjutan dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 12(4), 45–60.
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). Komparasi Kurikulum 1964 dan 1968 serta kajian materi geografi pada jenjang SMP. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Teknologi*, 9(1), 275–290. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v8i1.450>
- Suryani, T., & Sunardi, S. (2023). Pembelajaran kontekstual di Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Abad 21*, 1(1), 10–22.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Kurikulum dan pembelajaran: Perkembangan, pelaksanaan, dan evaluasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, M., & Rahmat, R. (2018). Implementasi Kurikulum Nasional dalam Membangun Kemandirian Belajar Siswa di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(3), 105–116.
- Tomlinson, C. A. (2017). *How to differentiate instruction in academically diverse classrooms* (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD.